

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Permasalahan mengenai rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Depok 2024 menunjukkan bahwa penyelenggaraan sosialisasi pemilu masih menjadi tantangan bagi KPU Kota Depok. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan utama yang dapat menjelaskan bagaimana strategi sosialisasi tersebut dijalankan serta sejauh mana strategi tersebut mampu mendorong partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Depok telah berupaya menjalankan berbagai strategi sosialisasi melalui kegiatan tatap muka, pemanfaatan media sosial, pendidikan pemilih, hingga kerja sama dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan. Berbagai program tersebut membuktikan bahwa KPU telah berusaha memenuhi tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pilkada 2024. Namun, pelaksanaan strategi tersebut belum mampu memberikan hasil yang optimal. Sosialisasi yang dilakukan masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang memperoleh informasi mengenai tahapan maupun pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pilkada. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Depok yang memiliki latar belakang dan tingkat mobilitas yang beragam.

Maka dengan hal itu, strategi yang diterapkan juga masih belum cukup adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Pemanfaatan media digital memang menjadi salah satu inovasi yang dilakukan KPU Kota Depok, tetapi pendekatan tersebut belum mampu menjangkau seluruh kelompok pemilih secara efektif. Di sisi lain, metode sosialisasi konvensional juga belum mampu mengatasi rendahnya minat sebagian masyarakat untuk mengikuti informasi mengenai Pilkada. Akibatnya, berbagai upaya yang telah dilakukan belum mampu mendorong peningkatan partisipasi pemilih secara signifikan.

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar pelaksanaan sosialisasi, seperti kejenuhan masyarakat

setelah rangkaian Pemilu 2024, pengurangan jumlah tempat pemungutan suara, tingginya mobilitas penduduk Kota Depok, serta menurunnya antusiasme masyarakat terhadap kontestasi politik lokal. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan partisipasi pemilih tidak hanya berkaitan dengan penyelenggara pemilu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan karakteristik masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan seluruh temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi sosialisasi KPU Kota Depok dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 secara keseluruhan masih belum efektif. Berbagai program sosialisasi memang telah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum mampu menjangkau masyarakat secara merata, belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik pemilih Kota Depok, dan pada akhirnya belum berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih sesuai dengan target yang diharapkan. Oleh karena itu, KPU Kota Depok perlu melakukan evaluasi terhadap pola sosialisasi yang selama ini diterapkan agar strategi yang digunakan pada pemilihan berikutnya tidak hanya berfokus pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga pada sejauh mana kegiatan tersebut benar-benar mampu menjangkau masyarakat dan mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya.

V.2 Saran

V.2.1 Saran Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kota Depok dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang strategi yang lebih tepat sasaran pada pemilihan berikutnya. Beberapa saran praktis yang dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut.

1. KPU Kota Depok perlu menyusun indikator kinerja sosialisasi yang berbasis outcome, bukan sekadar output, misalnya melalui survei pasca sosialisasi atau pemantauan perubahan tingkat pengetahuan dan minat memilih di kelompok sasaran, agar efektivitas program dapat diukur secara lebih objektif.
2. Program sosialisasi sebaiknya dijalankan secara berkelanjutan sepanjang periode kepengurusan, tidak hanya intensif menjelang hari pemungutan

suara, supaya kesadaran politik masyarakat terbangun secara bertahap dan tidak bergantung pada momentum jangka pendek.

3. KPU Kota Depok perlu memperkuat kehadiran langsung jajaran komisioner ke tingkat akar rumput, tidak hanya mendelegasikan seluruh interaksi teknis dengan penyelenggara ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS, agar kepercayaan dan kedekatan antara lembaga penyelenggara dengan pemilih dapat lebih terjaga.
4. Pendekatan sosialisasi perlu dirancang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan keragaman suku, agama, dan latar belakang budaya masyarakat Kota Depok, alih-alih terlalu bertumpu pada kelompok komunitas tertentu saja.
5. Perlu ada intervensi khusus bagi wilayah dengan tingkat partisipasi terendah, terutama Kecamatan Cinere dan Tapos, misalnya lewat program pendidikan pemilih yang lebih intensif di sekolah, kampus, dan lingkungan warga di kedua kecamatan tersebut.
6. Kebijakan penggabungan dan pengurangan jumlah TPS perlu dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan aksesibilitas pemilih, misalnya dengan memperhitungkan kembali rasio jumlah pemilih per TPS agar antrean tidak terlalu panjang, disertai perbaikan akurasi data pemilih untuk mengurangi kendala teknis di lapangan.
7. KPU Kota Depok, bersama Bawaslu dan partai politik, disarankan turut mendorong penguatan kualitas dan integritas calon kepala daerah yang diusung, karena kekecewaan masyarakat terhadap hasil Pilkada sebelumnya turut menjadi salah satu penyebab menurunnya minat masyarakat untuk kembali menggunakan hak pilihnya.
8. Sosialisasi ke depan perlu lebih menekankan relevansi Pilkada bagi kehidupan sehari-hari warga, misalnya dengan menjelaskan keterkaitan antara hasil pemilihan kepala daerah dan kebijakan pembangunan serta pelayanan publik di Kota Depok, agar masyarakat tidak menganggap Pilkada kurang penting dibandingkan pemilu nasional.

V.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada satu wilayah, sehingga temuannya belum tentu bisa digeneralisasi ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan politik berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran untuk pengembangan penelitian dan kajian teoritis selanjutnya.

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method agar hubungan antara strategi sosialisasi KPU dengan tingkat partisipasi pemilih dapat diuji secara statistik, tidak hanya dijelaskan secara deskriptif seperti pada penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian, misalnya dengan memasukkan tingkat kepercayaan politik masyarakat, tipologi pemilih menurut Milbrath dan Goel (1977), atau efektivitas media sosial secara terukur, karena penelitian ini baru menyentuh aspek strategi kelembagaan secara umum.
3. Replikasi penelitian pada kota atau kabupaten lain dengan karakteristik demografis berbeda, misalnya daerah non-penyangga ibu kota, akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan untuk melihat apakah pola penurunan partisipasi di Kota Depok bersifat khas kota urban atau memang terjadi secara lebih luas.
4. Kajian lanjutan mengenai konsep mobilisasi Rosenstone dan Hansen (1993) perlu didalami lebih jauh, khususnya terkait perbedaan pengaruh antara kuantitas kegiatan sosialisasi dengan kualitas kontak langsung antara penyelenggara pemilu dan pemilih, karena temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa banyaknya kegiatan tidak selalu berbanding lurus dengan naiknya partisipasi.

V.2.3 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diungkapkan secara terbuka, baik dari sisi metode, cakupan data, maupun proses pengumpulan informasi di lapangan. Keterbatasan ini penting

disampaikan agar hasil penelitian dapat dibaca secara proporsional dan tidak ditafsirkan melampaui apa yang sebenarnya bisa dijangkau oleh desain penelitian yang digunakan.

Pertama, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada satu wilayah, yaitu Kota Depok. Sebagaimana dijelaskan Marshall dan Rossman (1999) dalam *Designing Qualitative Research*, temuan dari studi kasus tunggal memang kuat dalam menggali kedalaman konteks lokal, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena tidak dirancang untuk mewakili populasi yang lebih luas. Dengan demikian, kesimpulan mengenai efektivitas strategi KPU dalam penelitian ini hanya berlaku untuk konteks Kota Depok dan belum tentu mencerminkan kondisi di kota atau kabupaten lain yang punya karakteristik demografis dan sosial politik berbeda.

Kedua, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan tidak menggunakan uji statistik untuk mengukur kekuatan hubungan antara strategi sosialisasi KPU dengan naik turunnya angka partisipasi pemilih. Analisis efektivitas dalam penelitian ini disusun berdasarkan interpretasi terhadap data wawancara dan dokumentasi, mengikuti prosedur analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), sehingga sifatnya adalah pemaknaan mendalam terhadap fenomena, bukan pembuktian sebab akibat yang terukur secara angka. Kesimpulan mengenai belum efektifnya strategi KPU perlu dibaca sebagai gambaran kualitatif, bukan sebagai hasil pengujian kausalitas statistik.